

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dinar Putri Suryani
dinarp792@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to empirically influence the application of government accounting standards, regional financial accounting system and human resource competence to the quality of local government financial statements in Sidoarjo regency. The approach used in this research is quantitative approach. The population in this research is Regional Device Work Unit of Sidoarjo District. The sampling technique used is purposive sampling technique. The data used are questionnaires or questionnaires. Each service is represented by 4 persons namely head of department and staff of accounting or finance department at SKPD of Sidoarjo District. The analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) application tool. The results showed that the application of government accounting standards, regional financial accounting system and human resource competence have a positive influence on the quality of local government financial statements.

Keywords: government accounting standard, regional financial accounting system, competence of human resources, quality of local government financial statements.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data angket atau kuisioner. Setiap dinas diwakili oleh 4 orang yaitu kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Sidoarjo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Di setiap Negara, termasuk Indonesia pasti ingin mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good government*. Pemerintahan yang baik dapat dicapai apabila pemerintah daerah berhasil membangun daerahnya sendiri sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Salah satu wujud nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang *accountable*. Laporan keuangan merupakan media untuk mengetahui apakah suatu pemerintah tersebut berjalan dengan baik. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memenuhi

karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada (Sukmaningrum, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah pertama kali dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Pada tahun 2010 SAP telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007). Pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah menjadi faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, faktor penting lainnya demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen paling penting dalam suatu organisasi. Peran organisasi dalam mendukung karir sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk keberhasilan organisasi.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan. BPK dapat memberikan 4 macam opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian maka laporan keuangan tersebut sudah memenuhi empat karakteristik kualitatif sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dari 537 LKPD, BPK memberikan 375 opini WTP, 139 opini WDP, 23 opini TMP. Masih banyaknya opini WDP dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas sistem pelaporan informasi pemerintah daerah belum optimal. Atas LKPD yang belum memperoleh opini WTP umumnya karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan terkait dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (2) untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah; (3) untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theori (Teori Keagenan)

Pelaporan keuangan di sektor publik didasari oleh konsep teori keagenan. Pemerintahan yang demokrasi memiliki hubungan keagenan yaitu pemerintah yang bertindak sebagai agen dan para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal*. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2004) merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dalam hal ini adalah laporan keuangan dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal* berhak untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban tersebut.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah pertama kali dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Pada tahun 2010, standar akuntansi pemerintah mengalami perubahan dari PP Nomor 24 Tahun 2005 direvisi menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam PP Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015.

Standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Menurut Afifah (2009: 27) standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian Sistem Akuntansi Daerah menurut Bastian (2007: 98) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berperan dalam upaya meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dalam organisasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diharapkan dapat menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat, dan

komprehensif sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: (1) Produser Akuntansi Penerimaan Kas; (2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas; (3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang Milik Daerah; (4) Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan kemampuan dasar dari seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam hal ini adalah pegawai dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai sehingga dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Hutapea dan Thoha (2008), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan dan perilaku individu.

Dalam suatu organisasi, terutama pada organisasi publik sumber daya manusia merupakan suatu elemen yang sangat penting. Menurut Azhar (2007) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia harus diperhatikan dengan baik, terutama pada sektor publik yaitu organisasi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya sumber daya yang kompeten tersebut, akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

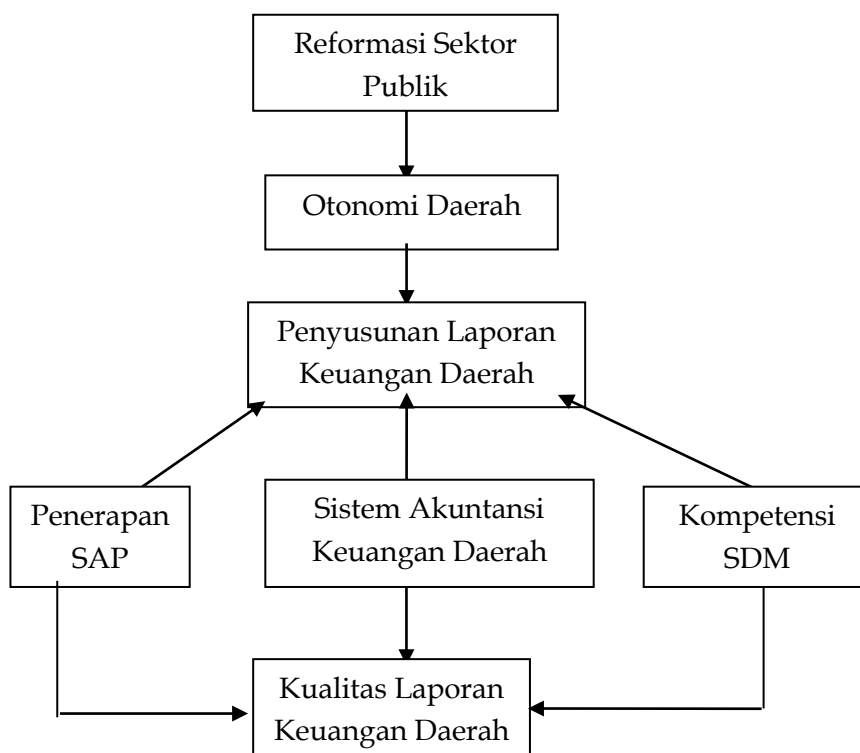
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai proses keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pasal 32 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah setidaknya tidaknya terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami.

Rerangka Pemikiran

Berkembangnya akuntansi sektor publik yang terjadi di Indonesia karena adanya era reformasi. Reformasi pada sektor publik ditandai dengan mulai berlakunya otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengelola keuangan daerah, Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan harus berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Baik buruknya kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat disusun rerangka pemikiran pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah

akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku (Wati *et al*, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik maka kualitas laporan keuangan daerah pun semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem akuntansi yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Roviyantie, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini adalah pegawai untuk menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan bidang, pendidikan, pengalaman yang telah dimiliki sehingga dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan daerah. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia akan mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan (Wati *et al*, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011: 8).

Menurut Sugiyono (2011: 61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas di Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 15 dinas. Pada masing-masing dinas tersebut akan dijadikan responden sebanyak 4 orang yaitu Kepala bagian Akuntansi dan Staf bagian Akuntansi.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan penulis (Sekaran, 2006). Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: (1) Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Sidoarjo; (2) Pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui pihak perantara. Adapun teknik yang digunakan adalah kuisisioner (angket). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2012: 192). Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dan terstruktur, yang artinya jawaban pada setiap pertanyaan yang disediakan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban selain jawaban-jawaban yang disediakan. Kuisisioner akan diberikan kepada setiap responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo.

Variabel dan Definisi Variabel

Variabel Independen

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner yang diambil dari penelitian Ningtyas (2015). Pada variabel ini digunakan 7 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert. Dalam variabel ini diukur dengan menggunakan 3 indikator, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner yang dikembangkan oleh Rovieyanti (2012). Pada variabel ini digunakan 10 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert. Dalam variabel ini diukur dengan menggunakan 4 indikator, yaitu: (1) Identifikasi; (2) Pengklasifikasian; (3) Sistem Pengendalian; (4) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini adalah pegawai untuk menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan bidang, pendidikan, pengalaman yang telah dimiliki sehingga dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner yang dikembangkan oleh Sudiarianti (2015). Pada variabel ini

digunakan 13 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert. Dalam variabel ini diukur dengan menggunakan 3 indikator, yaitu pengetahuan, keahlian, perilaku

Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD)

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dapat memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang dikembangkan oleh Sudiarianti (2015). Pada variabel ini digunakan 16 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert. Dalam variabel ini diukur dengan menggunakan 4 indikator, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Dalam menentukan kualitas data yang diperoleh dari jawaban para responden digunakan uji validitas dan reliabilitas. Validitas pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor setiap pertanyaan dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini, pernyataan yang mempunyai nilai koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi *Product Momen*. Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila $r = 0,3$. Jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2011: 183).

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2011: 268). Untuk uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2016: 48).

Uji Asumsi Klasik

Pada model regresi linear berganda ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun asumsi-asumsi yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: (a) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normalitas data dapat menggunakan statistik "*Kolmogorov Smirnov*" pada nilai *unstandardized residual*. Kriteria yang digunakan jika nilai "*Asymp Sig*" (2 tailed) lebih besar dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, (b) Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Ghozali (2011: 23) multikolinearitas dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 , (c) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan ada tidaknya pola tertentu

pada grafik *scatterplot*, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model Regresi

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yaitu metode regresi linier berganda. Persamaan umum untuk mengetahui regresi berganda adalah:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1.PSAP + \beta_2.SAKD + \beta_3.KSDM + \epsilon$$

Keterangan :

- KLKPD : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- β_1 : Koefisien regresi dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
- β_2 : Koefisien regresi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- β_3 : Koefisien regresi dari Kompetensi Sumber Daya Manusia
- PSAP : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
- SAKD : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- ϵ : Koefisien error

Uji Kelayakan Model (*Godness of Fit*)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Menurut Ghazali (2016), nilai koefisien determinasi mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/ uji anova. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti model tersebut bisa digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika tingkat signifikansi $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis. (2) Jika tingkat signifikansi $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis. (3) Jika tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$ maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa pernyataan dari semua variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia ataupun variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan hasil yang valid karena rhitung lebih besar dari $r \text{ tabel} = 0,312$. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reliabel, karena nilai *alpha cronbach's* untuk masing-masing variabel yang dihasilkan lebih dari 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas data dapat menggunakan statistik "*Kolmogorov Smirnov*" pada nilai *unstandarized residual*. Kriteria yang digunakan jika nilai "*Asymp Sig*" (2 tailed) lebih besar dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil perhitungan uji normalitas ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Kolmogorov-Smirnov Z	1.074
Asymp. Sig. (2-tailed)	.199

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi (nilai probabilitas) yang diperoleh lebih besar dari 0,05 ($0,199 > 0,05$) maka distribusinya adalah normal, sehingga dapat dilakukan regresi linear berganda.

Uji Multikolieritas

Multikolieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Adapun hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji multikolinieritas

Variabel bebas	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
PSAP	0.265	3.767	Tidak terjadi multikolinieritas
S AKD	0.288	3.477	Tidak terjadi multikolinieritas
KSDM	0.268	3.730	Tidak terjadi multikolinieritas

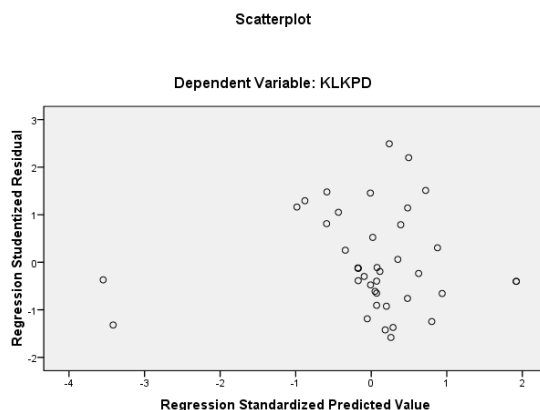
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari tabel diatas diketahui seluruh nilai tolerance diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10 sehingga antar variabel bebas tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pada grafik *scatterplot*. Dasar analisis untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Gambar 2

Hasil Output Pengujian Heteroskedastisitas

Dapat dilihat dari gambar 2, bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang jelas dan juga tersebar diatas ataupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedasitas pada model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Dari hasil pengujian asumsi klasik yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini layak dilakukan analisis regresi berganda karena telah memenuhi uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil perhitungan data, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda seperti pada tabel berikut:

Tabel 3
Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	0.409	0.287		1.423	.163
	PSAP	0.335	0.136	0.330	2.457	.019
	SAKD	0.329	0.120	0.352	2.734	.010
	KSDM	0.273	0.125	0.291	2.183	.036

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLKPD = 0,409 + 0,335PSAP + 0,329 SAKD + 0,273KSDM$$

Adapun penjelasan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: (1) Nilai koefisien β_1 untuk variabel PSAP bernilai 0,335 mengandung arti apabila terdapat peningkatan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,335. (2) Nilai koefisien β_2 untuk variabel SAKD bernilai 0,329 mengandung arti apabila terdapat peningkatan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,329. (3) Nilai koefisien β_3 untuk variabel KSDM bernilai 0,273 mengandung arti apabila terdapat

peningkatan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 1 satuan sementara variabel independen lainnya tetap, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,273.

Uji Kelayakan Model (Godness of Fit)

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi atau R – square menunjukkan persentase seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Berikut ini koefisien determinasi (R²) yang dihasilkan:

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.814	.24039	1.973

a. *Predictors: (Constant), KSDM, SAKD, PSAP*

b. *Dependent Variable: KLKPD*

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien R-square yang dihasilkan sebesar 0,828 yang artinya adalah variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia mampu mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 82,8%, sedangkan sisanya sebesar 17,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

Uji Model (Uji Statistik F)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/ uji anova. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika *p value* < (α) = 0,05 dan *Fhitung* > *Ftabel*, berarti model tersebut bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Berikut ini merupakan hasil output pengujian kelayakan model:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.013	3	3.338	57.760	.000 ^a
	Residual	2.080	36	.058		
	Total	12.094	39			

a. *Predictors: (Constant), KSDM, SAKD, PSAP*

b. *Dependent Variable: KLKPD*

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi uji F adalah sebesar 0,000 (*level of signifikan*), yang menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya keterkaitan antara

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai thitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika tingkat signifikansi $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis. (2) Jika tingkat signifikansi $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis. (3) Jika tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$ maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis. Berikut merupakan hasil Uji t:

Tabel 6
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constan)	.409	.287		1.423	.163
PSAP	.335	.136	.330	2.457	.019
SAKD	.329	.120	.352	2.734	.010
KSDM	.273	.125	.291	2.183	.036

a. *Dependent Variable: KLKPD*

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dan arah yang ditunjukkan positif sehingga hipotesis diterima. Artinya variabel independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dan arah yang ditunjukkan positif sehingga hipotesis diterima. Artinya variabel independen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,036 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dan arah yang ditunjukkan positif sehingga hipotesis diterima. Artinya variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terkait pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$, menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan di Pemerintah Daerah akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Standar Akuntansi Pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena masih banyaknya LKPD yang belum memperoleh opini WTP umumnya karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. Pada LKPD Kabupaten Sidoarjo, BPK memberikan opini WTP. Pemberian opini tersebut adalah bukti bahwa pemahaman dan penerapan SAP oleh entitas akuntansi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo sudah baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al.* (2014) menyatakan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azlim *et al.* (2012) dan Wijayanti (2017) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terkait pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$, menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan pemahaman sistem akuntansi yang baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan karena dengan sistem akuntansi yang lemah akan menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2012) menyatakan bahwa pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem akuntansi yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terkait pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$, menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini adalah pegawai untuk menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan bidang, pendidikan, pengalaman yang telah dimiliki sehingga dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

merupakan kunci keberhasilan dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pada pemerintah daerah. Pada SKPD Kabupaten Sidoarjo sumber daya manusia yang dimiliki sudah kompeten karena sebagian pegawai keuangan menyatakan setuju atas pernyataan dapat menyusun laporan keuangan secara baik serta dapat memahami siklus akuntansi dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al.* (2014) menyatakan dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemahaman sistem akuntansi yang baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan karena dengan sistem akuntansi yang lemah akan menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan. (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan daerah. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pada pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) Untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disarankan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia atas pengelola keuangan daerah melalui seminar atau pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar penyusunan laporan keuangan lebih efektif dan efisien serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan terus meningkat. (2) Untuk peneliti selanjutnya disarankan memperluas variabel penelitian, tidak hanya terbatas pada Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia namun juga dapat menambah variabel independen lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Untuk Peneliti selanjutnya dapat memperluas atau memperbesar jumlah sampel, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N.N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Azhar. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Thesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Azlim, Darwanis, dan U.A. Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi* 1 (1): 1-14.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. BPK. Jakarta.
- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hutapea, P. dan N. Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Ningtyas, P. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(1): 1-15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 26 Oktober 2007. Jakarta.
- Roviyantie, D. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Accounting* 1(1): 5-21.
- Sekaran, U., 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setyowati, L., W. Isthika, dan R.D. Pratiwi. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Semarang. *Jurnal Kinerja* 20(2): 179-191.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Sudiaranti, N. M. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Thesis*. Universitas Udayana. Bali.
- Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Jakarta.
- Wati, K., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi* 2(1): 1-11.
- Warisno. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Thesis*. Sekolah Pascasarjana USU. Medan.
- Wijayanti, R. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(3): 1-18.